

Evaluasi Efektivitas Kebijakan BOSDA dalam Mendukung Operasional Pendidikan di SMP Negeri 2 Sidoarjo

Oktavia Rahmadani Wahyudi ^{1*}, Nur Muji Arti Hidayah ², Nafiza Ardita Putri ³

^{1*,2,3} Program Studi Manajemen Pendidikan, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Surabaya, Kota Surabaya, Provinsi Jawa Timur, Indonesia.

Email: 24010714013@mhs.unesa.ac.id ^{1*}, 24010714014@mhs.unesa.ac.id ², 24010714019@mhs.unesa.ac.id ³

Histori Artikel:

Dikirim 29 Mei 2026; Diterima dalam bentuk revisi 1 Juli 2026; Diterima 5 Juli 2026; Diterbitkan 10 September 2026. Semua hak dilindungi oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Indonesia Banda Aceh.

Abstrak

Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA) merupakan program pemerintah daerah yang berperan penting dalam mendukung kebutuhan operasional sekolah yang belum sepenuhnya dapat dipenuhi melalui Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Evaluasi terhadap pelaksanaan BOSDA perlu dilakukan untuk mengetahui sejauh mana kebijakan tersebut mampu mendukung operasional sekolah secara efektif. Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan BOSDA dalam mendukung operasional SMP Negeri 2 Sidoarjo. Penelitian menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Informan penelitian terdiri atas pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan pengelola BOSDA di SMP Negeri 2 Sidoarjo. Evaluasi dilakukan berdasarkan lima dimensi evaluasi kebijakan William N. Dunn, yaitu efektivitas, kecukupan, responsivitas, ketepatan, dan kendala pelaksanaan kebijakan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa BOSDA berperan penting dalam mendukung operasional sekolah, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan sarana prasarana, honor tenaga pendukung, dan kebutuhan operasional lain yang tidak dapat dibiayai melalui BOS Reguler. Pencairan dana yang dilakukan secara triwulan dinilai semakin tertata, meskipun masih ditemukan kendala pada aspek administrasi pelaporan dan penyesuaian terhadap perubahan teknis. Monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Pendidikan turut mendukung akuntabilitas penggunaan dana BOSDA. Penelitian ini merekomendasikan penguatan sistem pelaporan berbasis digital, peningkatan pendampingan bagi pengelola BOSDA, serta menjaga ketepatan waktu pencairan dana agar efektivitas kebijakan BOSDA dapat terus ditingkatkan.

Kata Kunci: BOSDA; Efektivitas Kebijakan; Operasional Sekolah; Evaluasi Kebijakan; Pendidikan.

Abstract

The Regional School Operational Assistance (BOSDA) is a local government program that plays a crucial role in supporting school operational needs that cannot be fully met through the Regular School Operational Assistance (BOS). An evaluation of the implementation of BOSDA is necessary to determine the extent to which this policy is able to effectively support school operations. This study aims to evaluate the effectiveness of the BOSDA policy in supporting the operations of SMP Negeri 2 Sidoarjo. The study employs a descriptive qualitative approach with data collection techniques including interviews, observations, and documentation. The research informants consist of representatives from the Sidoarjo Regency Education Office and BOSDA administrators at SMP Negeri 2 Sidoarjo. The evaluation was conducted based on William N. Dunn's five dimensions of policy evaluation: effectiveness, adequacy, responsiveness, appropriateness, and implementation constraints. The results of the study indicate that BOSDA plays a crucial role in supporting school operations, particularly in meeting infrastructure needs, honoraria for support staff, and other operational requirements that cannot be funded through the Regular BOS. The quarterly disbursement of funds is considered increasingly well-organized, although challenges remain regarding administrative reporting and adjustments to changes in technical guidelines. Monitoring and evaluation conducted by the Education Office also support accountability in the use of BOSDA funds. This study recommends strengthening a digital reporting system, increasing guidance for BOSDA administrators, and ensuring timely fund disbursement so that the effectiveness of the BOSDA policy can continue to be improved.

Keyword: BOSDA; Policy Effectiveness; School Operations; Policy Evaluation; Education.

1. Pendahuluan

Pendidikan memegang peranan yang sangat penting dalam upaya meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Untuk mewujudkan sistem pendidikan yang bermutu, diperlukan dukungan pembiayaan yang memadai guna menjamin kelancaran berbagai aktivitas di sekolah. Aktivitas tersebut meliputi penyediaan sarana dan prasarana, pelaksanaan proses belajar-mengajar, kegiatan administrasi, serta pemenuhan kebutuhan tenaga kependidikan. Berdasarkan kajian literatur, (Andriyani *et al.*, 2025) menyebutkan bahwa keberhasilan operasional sekolah secara langsung berkontribusi terhadap peningkatan mutu pendidikan dan keberlanjutan proses pembelajaran. Pemerintah pusat telah menyalurkan bantuan pendidikan melalui program Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Reguler. Namun, dalam pelaksanaannya, masih terdapat kebutuhan-kebutuhan sekolah yang belum dapat terpenuhi sepenuhnya oleh dana BOS Reguler, mengingat adanya batasan-batasan penggunaan dana sesuai ketentuan yang berlaku. Sehubungan dengan hal tersebut, pemerintah daerah memberikan dukungan melalui program Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA), yang berfungsi sebagai dana pendamping BOS Reguler Pemerintah dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji implementasi dan efektivitas bantuan operasional pendidikan di berbagai daerah. Penelitian oleh (Regina *et al.*, 2020) menunjukkan bahwa program BOSDA berkontribusi terhadap pemenuhan kebutuhan operasional sekolah yang belum dapat dibiayai melalui BOS Reguler Pemerintah. (Lukas *et al.*, 2024) menemukan bahwa efektivitas pengelolaan dana bantuan pendidikan dipengaruhi oleh ketepatan penggunaan dana, sistem pelaporan, serta pengawasan yang dilakukan oleh pemerintah daerah. Selain itu, (Andriyani *et al.*, 2025) menegaskan bahwa dukungan pembiayaan pendidikan memiliki hubungan yang erat dengan peningkatan mutu layanan pendidikan di sekolah. Penelitian lain oleh (Abrida Basuni & Halim, 2023) menunjukkan bahwa efektivitas BOSDA dipengaruhi oleh mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban keuangan yang akuntabel. (Azizah, 2022) menyatakan bahwa evaluasi kebijakan dana BOS berdasarkan dimensi efektivitas, kecukupan, responsivitas, dan ketepatan dapat memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai keberhasilan program.

Selanjutnya, (Septiningrum *et al.*, 2023) menjelaskan bahwa efektivitas pengelolaan dana BOS dipengaruhi oleh kemampuan sekolah dalam mengelola administrasi dan pelaporan keuangan secara tepat. Penelitian (Halimah *et al.*, 2023) menunjukkan bahwa ketepatan penyaluran dana pendidikan berpengaruh terhadap kelancaran operasional sekolah. Sementara itu, (Nurjannah *et al.*, 2023) menyimpulkan bahwa program BOS mampu mendukung pelaksanaan kegiatan pendidikan apabila disertai pengawasan dan pengelolaan yang baik. Meskipun demikian, sebagian besar penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada implementasi program BOS maupun BOSDA secara umum, mekanisme pengelolaan dana, maupun efektivitas program di tingkat daerah. Penelitian yang secara khusus mengevaluasi efektivitas kebijakan BOSDA pada tingkat sekolah penerima, dengan membandingkan perspektif pemerintah daerah sebagai pelaksana kebijakan dan sekolah sebagai penerima manfaat, masih relatif terbatas. Oleh karena itu, penelitian ini dilakukan untuk mengisi kekosongan tersebut melalui evaluasi efektivitas kebijakan BOSDA di SMP Negeri 2 Sidoarjo. Di Kabupaten Sidoarjo, pelaksanaan BOSDA didasarkan pada Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA). Berdasarkan hasil wawancara dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, BOSDA dibentuk untuk mendukung pemerataan pendidikan dan memenuhi kebutuhan operasional sekolah yang belum tercukupi oleh BOS Reguler Pemerintah. BOSDA juga ditujukan untuk peningkatan mutu sekolah, pengembangan kompetensi guru, serta peningkatan kualitas peserta didik. Perlu diperhatikan bahwa penggunaan BOSDA tidak diperbolehkan melakukan double counting dengan BOS Reguler Pemerintah, sehingga setiap penggunaan dana harus sesuai dengan ketentuan petunjuk teknis yang berlaku. Berdasarkan hasil wawancara di SMP Negeri 2 Sidoarjo, BOSDA sangat membantu pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. Dana BOSDA sebagian besar digunakan untuk kebutuhan sarana prasarana sekolah, honorarium tenaga pendukung, serta kebutuhan operasional lain yang tidak dapat dibiayai oleh BOS Reguler Pemerintah.

Pihak sekolah menyampaikan bahwa BOSDA membantu kelancaran kegiatan sekolah karena dapat memenuhi kebutuhan yang sebelumnya sulit terpenuhi jika hanya mengandalkan BOS Reguler Pemerintah. Selain itu, sejak tahun 2022, sekolah juga menerima BOSDA KKO untuk mendukung program Kelas Khusus Olahraga (KKO). Pelaksanaan BOSDA masih menghadapi beberapa kendala, terutama dalam aspek pelaporan administratif dan penyesuaian terhadap perubahan petunjuk teknis yang hampir dilakukan setiap tahun. Selain itu, keterlambatan pencairan dana pada awal tahun anggaran pernah terjadi, sehingga mempengaruhi beberapa kebutuhan operasional sekolah yang telah direncanakan. Oleh karena itu, diperlukan evaluasi terhadap efektivitas kebijakan BOSDA dalam mendukung operasional sekolah agar pelaksanaan program dapat berjalan secara lebih optimal (Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2026).

2. Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Pendekatan kualitatif dipilih dengan tujuan untuk memahami dan menggambarkan secara mendalam bagaimana kebijakan BOSDA dilaksanakan dalam mendukung operasional sekolah, berpedoman pada kondisi nyata yang terjadi di lapangan. Sedangkan, penelitian deskriptif digunakan untuk mengetahui tingkat efektivitas kebijakan BOSDA melalui hasil wawancara dan observasi yang dilakukan secara mendalam. Lokasi penelitian berada di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan SMP Negeri 2 Sidoarjo. Pemilihan kedua lokasi tersebut didasarkan pada adanya keterkaitan antara Dinas Pendidikan sebagai organisasi yang mengelola kebijakan BOSDA dengan SMP Negeri 2 Sidoarjo yang menjadi sekolah penerima bantuan. Penelitian ini menitikberatkan pada aspek pelaksanaan, pemanfaatan, pengawasan, serta tingkat efektivitas BOSDA dalam memenuhi kebutuhan operasional sekolah. Sumber data penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara dan observasi langsung di lapangan. Informan penelitian terdiri atas dua orang, yaitu Willy Aksara, S.AP., selaku Pengelola Data dan Informasi di Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo, dan Ririn Wahyuningrum, S.Kom., selaku Guru Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang turut bertanggung jawab dalam pengelolaan BOSDA di SMP Negeri 2 Sidoarjo.

Data sekunder diperoleh dari Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2026. Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu wawancara, observasi, dan dokumentasi. Wawancara dilakukan secara langsung dengan menggunakan pedoman wawancara untuk memperoleh informasi mengenai pelaksanaan BOSDA, hambatan yang dihadapi, serta pengaruhnya terhadap operasional sekolah. Observasi dilaksanakan untuk memperhatikan kondisi dan penerapan BOSDA di lingkungan sekolah. Dokumentasi digunakan sebagai pelengkap data penelitian berupa dokumen kebijakan, laporan kegiatan, serta dokumentasi pelaksanaan kegiatan terkait BOSDA. Analisis data dilakukan dengan mengelompokkan terlebih dahulu hasil wawancara dan observasi berdasarkan fokus penelitian. Setelah itu, data disajikan secara deskriptif untuk menghasilkan simpulan mengenai tingkat efektivitas kebijakan BOSDA dalam mendukung operasional sekolah. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan teknik triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara dari pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dan pihak sekolah, sehingga data yang diperoleh dapat saling melengkapi dan memperkuat temuan penelitian.

3. Hasil dan Pembahasan

3.1 Hasil

3.1.1 Pelaksanaan Kebijakan BOSDA di SMP Negeri 2 Sidoarjo

Berdasarkan hasil wawancara, SMP Negeri 2 Sidoarjo telah menerima dana BOSDA sejak sekitar tahun 2005–2006. Selain itu, mulai tahun 2022, sekolah juga menerima BOSDA KKO untuk mendukung program Kelas Khusus Olahraga (KKO). Pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo

menjelaskan bahwa BOSDA merupakan dana pendamping dari BOS Reguler yang bersumber dari APBD Kabupaten Sidoarjo. Penyaluran dana dilakukan melalui rekening sekolah setelah melalui proses verifikasi dan pengecekan sesuai dengan petunjuk teknis (juknis) BOSDA. Pencairan dana BOSDA dilakukan sebanyak empat kali dalam satu tahun, yaitu setiap triwulan. Pihak sekolah menyampaikan bahwa pencairan dana pada tahun anggaran 2025–2026 dinilai lebih tertata dan lancar dibandingkan tahun sebelumnya, meskipun pada awal tahun anggaran masih pernah terjadi keterlambatan akibat proses administrasi dan pengajuan pencairan.

3.1.2 Penggunaan Dana BOSDA

Hasil wawancara menunjukkan bahwa dana BOSDA di SMP Negeri 2 Sidoarjo digunakan untuk mendukung kebutuhan operasional sekolah yang tidak dapat dibiayai melalui dana BOS Reguler. Penggunaan dana dilakukan berdasarkan kebutuhan sekolah dan ditetapkan melalui Tim BOSDA sekolah bersama dengan kepala sekolah serta pihak terkait lainnya. Berdasarkan hasil wawancara, penggunaan dana BOSDA di SMP Negeri 2 Sidoarjo dapat diringkas sebagai berikut:

Tabel 1. Penggunaan Dana BOSDA

No.	Kategori Penggunaan	Bentuk Penggunaan
1.	Sarana dan Prasarana	Pengadaan AC, lemari, kulkas, gorden, dan kebutuhan fasilitas sekolah lainnya.
2.	Honor Tenaga Pendukung	Guru GTT, PTT, wali kelas, staf, dan tenaga pendukung sekolah.
3.	Operasional Sekolah	Kebutuhan operasional yang tidak dapat dibiayai melalui dana BOS Reguler.
4.	Program Khusus	Dukungan kegiatan Kelas Khusus Olahraga (KKO) melalui BOSDA KKO.

Pihak sekolah menyampaikan bahwa penggunaan terbesar BOSDA berada pada bidang sarana dan prasarana dan honor tenaga pendukung sekolah. Keberadaan BOSDA dinilai sangat membantu karena mampu membiayai kebutuhan yang tidak dapat dipenuhi melalui BOS Reguler sesuai ketentuan yang berlaku. Data mengenai persentase alokasi penggunaan dana BOSDA pada setiap bidang tidak disajikan dalam penelitian ini karena informasi tersebut merupakan bagian dari dokumen pengelolaan keuangan internal sekolah. Penelitian ini hanya menyajikan gambaran bentuk pemanfaatan dana berdasarkan hasil wawancara dan dokumentasi yang diperoleh.

3.1.3 Monitoring dan Pelaporan BOSDA

Monitoring BOSDA dilakukan melalui pemeriksaan laporan penggunaan dana yang dikirimkan sekolah kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo. Selain itu, sekolah juga dapat diperiksa oleh inspektorat dan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memastikan kesesuaian laporan dan keberadaan barang yang dibeli menggunakan BOSDA. Pihak Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa monitoring dan evaluasi dilakukan setiap tahun melalui kegiatan monitoring lapangan, evaluasi berkala, serta pembinaan kepada sekolah. Jika ditemukan ketidaksesuaian dalam penggunaan dana, sekolah akan diminta melakukan revisi dan penyesuaian sesuai dengan juknis BOSDA. Selain kegiatan monitoring, Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo juga mulai mengembangkan sistem pengelolaan dan pelaporan BOSDA secara digital dan non-tunai guna meningkatkan efektivitas pengelolaan dana.

3.1.4 Kendala Pelaksanaan BOSDA

Dalam pelaksanaannya, pengelolaan BOSDA masih menghadapi beberapa kendala. Berdasarkan hasil wawancara, kendala utama terletak pada aspek administrasi pelaporan dan penyesuaian terhadap perubahan juknis yang hampir dilakukan setiap tahun. Pihak sekolah juga menyampaikan bahwa pelaporan BOSDA membutuhkan tingkat ketelitian yang tinggi karena berkaitan dengan pertanggungjawaban keuangan negara. Selain itu, pelaporan dilakukan di tengah tugas mengajar

yang cukup padat, sehingga menjadi tantangan tersendiri bagi pengelola BOSDA di sekolah. Kendala lain yang pernah terjadi adalah revisi laporan akibat penggunaan nota dari tahun sebelumnya yang tidak diperbolehkan dalam pelaporan BOSDA.

3.2 Pembahasan

Berdasarkan hasil penelitian, BOSDA dinilai efektif dalam mendukung operasional SMP Negeri 2 Sidoarjo. Hal ini terlihat dari kemampuan BOSDA dalam membantu memenuhi kebutuhan sekolah yang belum dapat dipenuhi melalui BOS Reguler, terutama di bidang sarana prasarana dan honor tenaga pendukung sekolah. Menurut William N. Dunn, efektivitas berkaitan dengan tingkat keberhasilan kebijakan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Dalam konteks ini, tujuan BOSDA sebagai dana pendamping BOS Reguler telah tercapai karena mampu membantu kelancaran operasional sekolah dan mendukung kegiatan pendidikan secara langsung. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Sephthingrum *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa dana bantuan operasional sekolah berperan penting dalam meningkatkan efektivitas pengelolaan sekolah melalui pemenuhan kebutuhan operasional dan peningkatan akuntabilitas pengelolaan dana. Selain itu, penelitian (Nurjannah *et al.*, 2023) juga menegaskan bahwa program BOS efektif dalam meningkatkan layanan pendidikan karena mampu membantu pembiayaan kebutuhan operasional yang tidak dapat dipenuhi dari sumber lain. Hal ini didukung oleh temuan bahwa efektivitas program bantuan operasional sangat dipengaruhi oleh aspek transparansi dan akuntabilitas dari pihak manajemen sekolah dalam merealisasikan anggaran (Sjioen & Ludji, 2020). Selanjutnya, dari segi kecukupan kebijakan, BOSDA dianggap mampu memenuhi kebutuhan sekolah. Berdasarkan hasil penelitian, BOSDA cukup membantu kebutuhan operasional sekolah, terutama dalam pengadaan sarana prasarana dan pembayaran honor tenaga pendukung. Sebelum adanya BOSDA, beberapa kebutuhan sekolah sulit dipenuhi jika hanya mengandalkan BOS Reguler. Setelah keberadaan BOSDA, kebutuhan operasional sekolah menjadi lebih terbantu, meskipun belum sepenuhnya menutupi seluruh kebutuhan sekolah. Menurut Dunn (2018), suatu kebijakan dikatakan memiliki kecukupan apabila mampu memberikan solusi terhadap masalah yang dihadapi kelompok sasaran.

Dalam hal ini, BOSDA telah memberikan kontribusi nyata terhadap kebutuhan operasional sekolah. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan studi (Abrida Basuni & Halim, 2023) mengenai BOSDA di Kabupaten Sleman, yang menunjukkan bahwa bantuan operasional daerah mampu membantu kebutuhan sekolah, tetapi efektivitasnya tetap dipengaruhi oleh mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban dana. Dengan demikian, BOSDA tidak sepenuhnya menyelesaikan seluruh kebutuhan sekolah, tetapi mampu mengurangi keterbatasan pembiayaan operasional yang dihadapi, mengingat alokasi dana berskala daerah sering kali belum mampu mencakup seluruh kebutuhan investasi jangka panjang sekolah karena keterbatasan pagu anggaran (Silele *et al.*, 2017). Dari aspek responsivitas, pihak sekolah memberikan respon positif terhadap kebijakan BOSDA karena manfaatnya dirasakan langsung dalam mendukung kegiatan sekolah. Mereka berharap BOSDA tetap dilanjutkan dan ditingkatkan, karena dinilai sangat membantu operasional sekolah. Respon positif ini menunjukkan bahwa kebijakan BOSDA memperoleh penerimaan yang baik dari sekolah sebagai penerima manfaat. Menurut Dunn (2018), responsivitas dapat dilihat dari tingkat kepuasan kelompok sasaran terhadap kebijakan yang dilaksanakan. Respon positif dari SMP Negeri 2 Sidoarjo menunjukkan bahwa BOSDA mampu menjawab kebutuhan sekolah sebagai penerima manfaat. Temuan ini sejalan dengan penelitian (Halimah *et al.*, 2023) yang menunjukkan bahwa keberhasilan pengelolaan dana BOS turut dipengaruhi oleh penerimaan dan keterlibatan sekolah dalam proses perencanaan, pelaksanaan, serta pertanggungjawaban dana bantuan pendidikan. Responsivitas yang baik ini terwujud karena adanya keselarasan antara prioritas kebutuhan mutlak sekolah dengan komponen pembiayaan yang diizinkan dalam petunjuk teknis bantuan (Ridho, 2024). Dari segi ketepatan, penggunaan BOSDA telah disesuaikan dengan juknis dan kebutuhan operasional sekolah. Pihak Dinas Pendidikan melakukan monitoring, evaluasi, dan pembinaan secara berkelanjutan untuk memastikan penggunaan dana tetap sesuai aturan. Selain itu, proses verifikasi sebelum pencairan menunjukkan upaya pengendalian penggunaan dana agar tepat sasaran.

BOSDA menunjukkan ketepatan kebijakan karena penggunaannya diarahkan untuk memenuhi kebutuhan operasional yang belum bisa dibiayai melalui BOS Reguler. Penelitian (Azizah, 2022) yang menggunakan teori evaluasi William Dunn juga menunjukkan bahwa ketepatan penggunaan dana dan pengawasan berkelanjutan merupakan faktor penting dalam memastikan dana bantuan pendidikan mencapai tujuan yang diharapkan, melalui pengawasan melekat yang memastikan setiap rupiah berkorelasi langsung dengan standar pelayanan minimal sekolah (Wirawan *et al.*, 2020). Meskipun demikian, terdapat kendala dalam pelaksanaan BOSDA. Hasil wawancara mengungkapkan bahwa kendala utama terletak pada aspek administrasi pelaporan dan penyesuaian terhadap perubahan juknis yang hampir dilakukan setiap tahun. Keterlambatan pencairan dana pada awal tahun anggaran juga pernah terjadi, akibat proses administrasi dan verifikasi yang memakan waktu. Hal ini menunjukkan bahwa efektivitas kebijakan BOSDA masih memerlukan perbaikan, terutama pada sistem administrasi dan pelaporan. Kendala lain yang muncul adalah revisi laporan akibat penggunaan nota dari tahun sebelumnya yang tidak diperbolehkan dalam pelaporan BOSDA (Abrida Basuni & Halim, 2023). Upaya pengembangan sistem digital dan non-tunai oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo menjadi langkah yang tepat untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BOSDA. Berdasarkan hasil evaluasi menggunakan teori Dunn, kebijakan BOSDA layak untuk dilanjutkan karena memberikan manfaat nyata terhadap operasional sekolah, namun masih memerlukan revisi dan penyempurnaan pada aspek administrasi serta pelaporan agar pelaksanaannya menjadi lebih efektif dan efisien.

4. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan untuk mengevaluasi efektivitas kebijakan BOSDA dalam mendukung operasional SMP Negeri 2 Sidoarjo, dapat disimpulkan bahwa kebijakan BOSDA memiliki peranan yang penting dalam membantu pemenuhan kebutuhan operasional sekolah. BOSDA berfungsi sebagai dana pendamping BOS Reguler Pemerintah yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan sekolah yang belum tercakup oleh dana BOS Reguler dari pusat, khususnya di bidang sarana prasarana, honorarium tenaga pendukung sekolah, dan berbagai kebutuhan operasional lainnya. Keberadaan BOSDA dinilai efektif karena membantu kelancaran kegiatan sekolah serta mendukung proses pembelajaran secara tidak langsung. Hasil penelitian menunjukkan adanya keselarasan antara tujuan kebijakan BOSDA yang diarahkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo dengan implementasi di lapangan. Dinas Pendidikan menjelaskan bahwa BOSDA diberikan untuk mendukung pemerataan pendidikan, peningkatan mutu sekolah, pengembangan kompetensi guru, dan peningkatan kualitas peserta didik. Di sisi lain, pihak sekolah menyampaikan bahwa BOSDA sangat membantu dalam memenuhi kebutuhan operasional yang sebelumnya sulit terpenuhi jika hanya bergantung pada BOS Reguler.

BOSDA dinilai telah berjalan sesuai dengan tujuan kebijakan yang ditetapkan. Penyelenggaraan BOSDA dilakukan melalui mekanisme pengajuan, verifikasi, pencairan dana secara triwulanan, serta monitoring dan evaluasi terhadap penggunaannya. Pengawasan dilakukan oleh Dinas Pendidikan melalui kegiatan monitoring dan evaluasi, serta melibatkan inspektorat dan auditor seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Selain itu, pengembangan sistem pengelolaan digital dan non-tunai menjadi salah satu upaya untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan BOSDA. Meskipun demikian, pelaksanaan BOSDA masih menghadapi beberapa kendala, terutama pada aspek administratif pelaporan, penyesuaian terhadap perubahan petunjuk teknis, serta keterlambatan pencairan dana di awal tahun anggaran. Proses pelaporan yang cukup kompleks menyebabkan sekolah harus terus menyesuaikan administrasi agar sesuai ketentuan terbaru. Namun secara keseluruhan, kebijakan BOSDA tetap layak untuk dilanjutkan karena memberikan manfaat besar terhadap operasional sekolah. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan pada aspek administratif, sistem pelaporan digital, dan kestabilan pencairan dana agar efektivitas kebijakan BOSDA dapat terus meningkat dalam mendukung mutu pendidikan di sekolah. Penelitian selanjutnya disarankan untuk melakukan kajian komparatif di berbagai sekolah atau kabupaten yang menerapkan kebijakan serupa guna

memperoleh gambaran yang lebih luas mengenai efektivitas BOSDA dalam mendukung operasional sekolah dan peningkatan mutu pendidikan.

5. Ucapan Terima Kasih

Peneliti menyampaikan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya, artikel ini dapat diselesaikan dengan lancar. Peneliti juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan bantuan, dukungan, serta masukan berharga selama proses penyusunan artikel ini. Terima kasih peneliti disampaikan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Sidoarjo yang telah memberikan izin serta informasi berkaitan dengan pelaksanaan kebijakan BOSDA. Terima kasih juga penelitiucapkan kepada SMP Negeri 2 Sidoarjo yang telah bersedia menjadi lokasi penelitian serta memberikan data dan informasi yang diperlukan dalam penelitian ini. Selanjutnya, peneliti mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah yang telah memberikan bimbingan dan pengarahan selama proses penyusunan artikel. Asimismo, peneliti berterima kasih kepada keluarga, rekan, dan seluruh pihak yang telah memberikan dukungan sehingga artikel ini dapat terselesaikan dengan baik. Peneliti menyadari bahwa artikel ini masih terdapat berbagai kelemahan. Oleh karena itu, peneliti mengharapkan kritik dan saran yang bersifat konstruktif guna penyempurnaan penelitian di masa mendatang.

6. Daftar Pustaka

- Abrida Basuni, N. A., & Halim, A. (2023). Evaluasi mekanisme pelaksanaan dan pertanggungjawaban belanja dana bantuan operasional sekolah daerah (BOSDA) pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sleman. *ABIS: Accounting and Business Information Systems Journal*, 11(2), 133–147. <https://doi.org/10.22146/abis.v11i2.83652>.
- Andriyani, M., R., Umar, & Mulawarman, W. G. (2025). Efektivitas pengelolaan dana BOS dalam meningkatkan kinerja sekolah. *Jurnal Penelitian*, 10, 401–407. <https://doi.org/10.23969/jp.v10i02.26403>.
- Azizah, L. L. (2022). Evaluasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah (BOS) melalui teori William Dunn (studi kasus pada SDN Lidah Kulon/464 Surabaya). *Jurnal Manajemen Pendidikan*, 48–57. <https://doi.org/10.21009/jmp.v14i2.35797>.
- Dunn, W. N. (2018). *Public policy analysis: An integrated approach* (6th ed.). Routledge.
- Halimah, L. M., Muslihin, H. Y., Asphar, F. Q., Nurjanah, N., & Widianingsih, S. (2023). Efektivitas penyaluran dana bantuan operasional sekolah (BOS) di SD. *Manajemen Pendidikan*, 18(1), 11–25. <https://doi.org/10.23917/jmp.v18i1.21711>.
- Lukas, A. O., Fuad, N., & Rugaiyah. (2024). The transparency of the management of school operational assistance (BOS) funds at SMP Negeri 230 Jakarta. *International Education Trend Issues*, 2(2), 317–328. <https://doi.org/10.56442/iet.v2i2.643>.
- Mubarok, Y., Sulistiyarini, S., & Basri, M. (2025). Transformasi digital aplikasi Rencana Kegiatan dan Anggaran Sekolah (ARKAS) untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan sekolah. *Jurnal Ilmiah Global Education*, 6(4), 2704–2725. <https://doi.org/10.55681/jige.v6i4.4557>.

- Nurjannah, N. B., Remmang, H., & Suriani, S. (2023). Efektivitas program bantuan operasional sekolah. *Indonesian Journal of Business and Management*, 6(1), 46–50. <https://doi.org/10.35965/jbm.v6i1.3864>.
- Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 10 Tahun 2026 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah Daerah (BOSDA).
- Regina, B., Soeaidy, S., & Ribawanto, H. (2020). Implementasi kebijakan bantuan operasional sekolah di Kota Malang (Studi di Dinas Pendidikan Kota Malang). *Jurnal Administrasi Publik*, 3(1), 61–66. <https://doi.org/10.23887/japi.v14i1.2023>.
- Ridho, A. (2024). Implementasi kebijakan pembiayaan pendidikan gratis pada SMK Negeri 1 Paringin Kabupaten Balangan (Studi Perda Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pendidikan). *Teaching and Learning Journal of Mandalika (Teacher)*, 2(1), 306–312.
- Septhiningrum, A. P., Sumtaky, M., & Zuhroh, D. (2023). Analisis efektivitas pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS). *JRAP (Jurnal Riset Akuntansi dan Perpajakan)*, 10(1), 1–86. <https://doi.org/10.35838/jrap.2023.010.01.09>.
- Silele, E., Sabijono, H., & J. Pusung, R. (2017). Evaluasi pengelolaan dana bantuan operasional sekolah (BOS): Studi kasus pada SD Inpres 4 Desa Akediri, Kecamatan Jailolo, Kabupaten Halmahera Barat. *Jurnal Emba: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi*, 5(2), 1626–1635.
- Sjioen, A. E., & Ludji, S. R. (2020). Analisis efektivitas pengelolaan bantuan operasional sekolah (BOS) pada Sekolah Dasar Negeri Bonipoi 2 Kota Kupang. *Inspirasi Ekonomi: Jurnal Ekonomi Manajemen*, 2(3), 12–18. <https://doi.org/10.32938/jie.v2i3.732>.
- Wirawan, M., Haryono, B. S., & Hadi, M. (2020). Evaluasi kebijakan dana bantuan operasional sekolah dalam meningkatkan mutu pendidikan: Studi pada Sekolah Dasar Negeri Percobaan 1 Kota Malang. *Jurnal Administrasi Publik Mahasiswa Universitas Brawijaya*, 3(1), 12–15.